

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA
PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos)**

Pembimbing :

SUSILAWATI, M.Si, Ph.d

Drs. RAMLI, M.Pd

Oleh:

BHAKTI PERSADA

NRP. 18.04.295



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL PROGRAM SARJANA
TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA
PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Disusun Oleh:
Bhakti Persada
NRP. 18.04.295**

**Skripsi ini telah disetujui pembimbing
Pada 31 Agustus 2023**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Susilawati, M.Si, Ph.D
NIP. 196309091988102001**

**Drs. Ramli A. Rahman, M.Pd
NIP. 196610161988101001**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA
PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Disusun Oleh:
Bhakti Persada
NRP. 18.04.295**

**Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus
Pada 31 Agustus 2023**

Pembimbing I

**Susilawati, M.Si, Ph.D
NIP. 196309091988102001**

Pembimbing II

**Drs. Ramli A. Rahman, M.Pd
NIP. 196610161988101001**

Diketahui

Direktur Poltekesos Bandung

**Dr. Marjuki, M.Sc.
NIP. 19601010 198603 1 010**

**Ketua Program Studi Pekerjaan
Sosial Program Sarjana Terapan**

**Dr. Aep Rusmana, M.Si.
NIP. 19681101 199403 1 003**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bhakti Persada lahir pada tanggal 10 Februari 2000 di Kota Painan. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Kadarwan dan Ibu Umie Kalsum. Penulis beragama Islam dan beralamat di Kota Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat.

Riwayat Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain pendidikan Sekolah dasar di SDN 08 Painan Selatan (2012), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Painan (2015), Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Painan (2018). Penulis melanjutkan pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai mahasiswa program Pendidikan Sarjana Terapan Pekerja Sosial pada Tahun 2018.

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Don’t stop when you are tired, Stop when you are done! “

~ David Goggins ~

Sebuah persembahan untuk kedua orang tuaku,
keluargaku, dan orang-orang terkasih.

ABSTRAK

BHAKTI PERSADA. 18.04.295. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dosen Pembimbing : Susilawati dan Ramli

Kota Painan merupakan daerah yang rawan dengan berbagai macam bencana. Hal ini disebabkan oleh topografi yang berupa dataran hingga pegunungan dengan ketinggian berkisar 0-1000 M di atas permukaan laut. Karakteristik fisik daerah yang memiliki topografi datar sering menjadi daerah sasaran banjir ketika musim hujan, dan erosi yang disebabkan oleh aktivitas laut, maupun terjadinya longsor di sekitar area perbukitan. Dimana kejadian bencana alam ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik itu berupa hancurnya bangunan, kegagalan panen, kerusakan prasarana fisik, hingga adanya korban yang meninggal dunia. Walaupun demikian bencana alam dapat ditanggulangi salah satu cara untuk menanggulangi bencana adalah dengan cara mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun dengan cara penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Dalam perihal penanggulangan bencana, pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar, dimana hal ini dimuat dalam Undang-Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga dengan adanya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan maka hal tersebut satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan. Dan untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, yang bertujuan agar mampu menjelaskan secara rinci mengenai topik yang dibahas. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik observasi dan juga melakukan wawancara dengan para informan. Dan pengecekan data agar mendapatkan keabsahan data maka menggunakan cara derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), ketergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Comfirmability*).

Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan hasil bahwa BPBD Kota Painan telah melakukan mitigasi bencana, yang dimana dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi

non struktural. Dalam mitigasi struktural BPBD Kota Painan melakukan pembangunan secara fisik, seperti, pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Sedangkan untuk mitigasi non struktural, BPBD Kota Painan sendiri melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, serta pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan lain tentang penanggulangan bencana alam.

Kata Kunci: *Mitigasi, Bencana Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kota Painan*

ABSTRACT

BHAKTI PERSADA. 18.04.295. The Role of the Regional Disaster Management Agency in Natural Disaster Mitigation Efforts in Painan City, Pesisir Selatan Regency. Supervisors : Susilawati and Ramli

The city of Painan is a region prone to various disasters. This is due to its topography, which ranges from plains to mountains with elevations ranging from 0 to 1000 meters above sea level. The flat topography of the plains often makes them susceptible to flooding during the rainy season, while erosion is caused by maritime activities, and landslides occur in the hilly areas. These natural disasters have undoubtedly caused losses to the community, including the destruction of buildings, crop failures, physical infrastructure damage, and even loss of life. However, natural disasters can be mitigated, and one way to do so is through disaster mitigation, which involves a series of efforts to reduce disaster risks, either through physical development or through awareness and disaster response capacity-building.

In disaster management, the government also bears significant responsibility, as outlined in Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management. Hence, with the existence of the Regional Disaster Management Agency (Badan Penanggulangan Bencana Daerah or BPBD) of South Pesisir Regency, it represents the South Pesisir Regency Government's commitment to disaster management in the region.

Therefore, the author is interested in discussing the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in natural disaster mitigation efforts in Painan City. To investigate this, the researcher employs a qualitative approach and a descriptive method, aiming to

provide a detailed explanation of the topic. To gather the necessary data, the researcher uses observation techniques and conducts interviews with various informants. Data validation is achieved through methods like credibility, transferability, dependability, and confirmability.

After conducting the research, the results show that the BPBD of Painan City has engaged in disaster mitigation efforts, which can be categorized into two types: structural and non-structural mitigation. In structural mitigation, the BPBD of Painan City has undertaken physical development, such as constructing flood embankments, installing early warning systems, building shelters, and evacuation routes. On the other hand, for non-structural mitigation, the BPBD of Painan City has focused on strengthening the community's capacity, conducting public awareness campaigns and simulations, as well as drafting local regulations on disaster management and other policies related to natural disaster response.

Keywords: *Mitigation, Natural Disasters, BPBD, Painan city*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdikan yang bernaafaskan Islam kepada Allah SWT atas berkah, nikmat iman dan Islam serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Akhir yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan.”

Peneliti menyadari dalam proses pembuatan karya ilmiah ini hingga akhirnya bisa diselesaikan karena berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, karya ilmiah ini tidak akan tersusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dr. Aep Rusmana, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial Poltekesos Bandung.
3. Susilawati, M.Si, Ph.D dan Drs. Ramli A.Rahman, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Alm. Bapak Kadarwan dan Ibu Umi Kalsum, selaku orangtua peneliti, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan peneliti, memberikan kasih sayang, dukungan tanpa henti berupa moril maupun materil kepada peneliti.
5. Kakak-kakakku tersayang, yang senantiasa menyalurkan bantuan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.

6. Suci Islami yang membantu menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Poltekesos Bandung yang telah membina dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
8. Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menerima dan mengakomodir kebutuhan penelitian.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menerima keberadaan peneliti dengan baik dan mendukung selama penelitian berlangsung.
10. Seluruh informan penelitian yang berada di Kota Painan yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penelitian.
11. Dan semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan dari pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dibalas dengan kebaikan pula. Pada akhirnya dengan penuh rasa hormat peneliti menyajikan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan profesi pekerjaan sosial.

Bandung, Juli 2023

Peneliti

Bhakti Persada
NRP. 18.04.295

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP.....	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat Penelitian	
1.5. Sistematika Penulisan	
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL	
2.1. Penelitian Terdahulu	
2.1.1. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok. Oleh Rangga Laroma Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.....	
2.1.2. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang	
2.1.3. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Medan.....	
2.2. Teori yang relevan tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Sosial dengan Bencana.....	
2.2.1. Definisi Bencana Alam	
2.2.2. Konsep Mitigasi	
2.2.3. Konsep Peran.....	
2.2.4. Aspek-Aspek Peran	
2.2.5. Jenis-Jenis Peran	
2.2.6. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	
2.2.7. Penanggulangan Bencana.....	
2.2.8. Relevansi Penelitian dengan Pekerjaan Sosial dengan Bencana.....	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	
3.2. Penjelasan Istilah.....	
3.3. Penjelasan Latar Penelitian	
3.4. Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data	

3.4.1. Sumber Data	
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	
3.6. Pemeriksaan Keabsahan Data	
3.7. Teknik Analisa Data.....	
3.8. Jadwal dan Langkah-Langkah Penelitian.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1. Struktur Organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pesisir Selatan.....	
4.1.2. Fungsi Pokok BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pesisir Selatan.....	
4.1.3. Tugas Pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	
4.2. Hasil Penelitian	
4.2.1. Karakteristik Informan	
4.2.2. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam.....	
4.3. Pembahasan.....	
4.3.1. Analisis Hasil Penelitian	
4.3.2. Analisis Masalah	
4.3.3. Analisis Kebutuhan	
4.3.4. Analisis Sistem Sumber.....	
BAB V USULAN PROGRAM.....	
5.1. Dasar Pemikiran.....	
5.2. Nama Program	
5.3. Tujuan Program.....	
5.3.1. Tujuan Umum.....	
5.3.2. Tujuan Khusus	
5.4. Sasaran Program	
5.5. Pelaksanaan Program	
5.5.1. Sistem Partisipan	
5.5.2. Pengorganisasian Program	
5.6. Metode dan Teknik	
5.6.1. Metode Pekerjaan Sosial Makro.....	
5.6.2. Teknik.....	
5.7. Kegiatan Program	
5.8. Langkah-Langkah Pelaksanaan.....	
5.8.1. Tahap Persiapan	
5.8.2. Tahap Pelaksanaan	
5.8.3. Tahap Evaluasi	
5.8.4. Tahap Pengakhiran	
5.9. Rencana Anggaran Biaya.....	
5.10. Analisis Kelayakan	
5.11. Indikator Keberhasilan	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	
6.2. Saran.....	
6.2.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6.2.2. Penelitian Lanjutan	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	
Tabel 3.2. Jadwal dan Langkah-Langkah Penelitian	
Matriks 4.1. Karakteristik Informan.....	
Matriks 4.2. Tabel Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2020.....	
Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan	
Tabel 5.2. Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Mitigasi Bencana dan Peta Rawan Bencana	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Pesisir Selatan.....	65
Gambar 5.1. Sistem Pengorganisasian.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam. Sepanjang masa alam dan lingkungannya telah menyediakan sumber daya demi kesejahteraan hidup manusia. Namun alam tidak selalu berpihak pada manusia, alam juga bisa menjadi ancaman bagi manusia, jika manusia tidak menjaganya dengan baik. Terkadang alam bisa menyebabkan kehancuran, kerusakan, dan korban jiwa akibat bencana alam.

Indonesia adalah negara yang rawan dengan berbagai macam bencana. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang dilewati oleh Cincin Api (*Ring Of Fire*) atau jalur gunung api aktif di dunia, serta negara yang berada di tiga lempeng besar dunia yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, badai tropis, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana non alam seperti wabah penyakit maupun bencana sosial seperti konflik, kerusuhan, dan terorisme.

Kota Painan adalah sebuah nagari dan kota kecil yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat. Kota ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan IV Jurai yang dapat diakses melalui Jalan Raya Lintas Sumatra bagian Barat. Kota Painan memiliki topografi yang berupa dataran hingga pegunungan, dengan ketinggian

berkisar 0-1000 M diatas permukaan laut. Dimana topografi seperti wilayah Kota Painan ini merupakan wilayah yang dapat dikatakan rawan akan terjadinya bencana. Karena karakteristik fisik daerah yang memiliki topografi datar sering menjadi daerah sasaran banjir ketika datangnya musim penghujan, dan erosi yang disebabkan oleh aktivitas laut sedangkan karakteristik fisik daerah yang memiliki topografi pegunungan sering mengalami bencana alam berupa longsor lahan.

Berdasarkan data dari “Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2022” tercatat bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2021 telah terjadi gempa bumi sebanyak 10 kali, banjir 17 kali, tanah longsor 10 kali, dan angin topan sebanyak 14 kali. Kejadian bencana alam ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik itu berupa hancurnya bangunan, kegagalan panen, kerusakan prasarana fisik, hingga adanya korban yang meninggal dunia. Sehingga dengan mengingat rawannya wilayah Kota Painan terhadap bencana alam, maka sangat diharapkan adanya pemetaan bahaya dan risiko bencana alam yang digunakan untuk mereduksi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana alam.

Perihal dalam penanggulangan bencana ini, secara nasional telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sangat diperlukan karena mitigasi bertujuan agar masyarakat menjadi sadar serta bersiap-siaga untuk menghadapi bencana yang tidak diperkirakan datangnya. Peranan BPBD dalam hal ini sangatlah penting, yakni dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana yang meliputi pengetahuan bencana, peringatan dini, tindakan saat terjadi bencana, pengetahuan risiko bencana, dan tindakan setelah terjadi bencana pada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Adapun peran serta yang telah dilakukan dalam usaha melakukan kegiatan penanggulangan bencana antara lain pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, kegiatan fasilitasi dan penanganan darurat/pemulihan awal akibat bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kegiatan pelatihan mitigasi bencana dan sosialisasi budaya sadar bencana, dan kegiatan penyediaan logistik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan peran mitigasi bencana, yang dimana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Dalam mitigasi struktural Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) di Kota Painan melakukan pembangunan secara fisik dan teknis, seperti pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembangunan shelter dan pembuatan jalur evakuasi bencana. Sedangkan untuk mitigasi struktural, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di Kota Painan sendiri melakukan penguatan kapasitas masyarakat, melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, serta pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan lain tentang Penanggulangan bencana alam.

Dari uraian diatas maka penulis mengambil BPBD Pesisir Selatan sebagai subjek penelitian, sebab menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. BPBD Pesisir Selatan sendiri baru didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Melihat banyaknya bencana yang terjadi di Kota Painan baik bencana longsor, angin puting beliung, banjir dan bencana lain maka BPBD sangat diperlukan masyarakat dalam hal bantuan apabila terjadi bencana, namun bantuan yang dimaksudkan juga berupa pemberian pengetahuan bagi masyarakat mengenai bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya yang mungkin terjadi. Oleh karena itu pemerintah membentuk badan yang bertanggung jawab untuk menangani

permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian mengenai peran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana di wilayah yang rawan bencana khususnya di Kota Painan. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan?”

Selanjutnya rumusan masalah difokuskan pada :

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya Mitigasi Struktural di kota Painan?
2. Bagaimana peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya Mitigasi Non-Struktural Bencana di Kota Painan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan Mitigasi Struktural dan Mitigasi

Non-Struktural di Kota Painan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi Struktural di kota Painan.
2. Mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi Non- Struktural di kota Painan.
3. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural di Kota Painan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan pendapat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan program mitigasi bencana sehingga penelitian ini bisa juga dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, program kerja dan keputusan dalam mitigasi bencana yang akan diambil.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang kajian pustaka tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal serta langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan penelitian.
- BAB V : USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program. metode dan teknik kegiatan yang dilakukan, langkah langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, serta indikator keberhasilan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang
kesimpulan dan saran hasil penelitian secara umum

DAFTAR PUSTAKA

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Peran BPBD Dalam Upaya Mitigasi di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

2.1.1. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok. Oleh Rangga Larama Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

Pada penelitian ini ingin melihat peranan BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok NTB. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di Lombok dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam Gempa Bumi di Lombok.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 1 minggu setelah sidang proposal yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu 6 Februari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020. Lokasi penelitian ini di BPBD Provinsi NTB yang terletak di jalan Lingkar selatan, Jempong Baru Kec.Sekarbela, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta teknik keabsahan data meliputi trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di pulau Lombok memiliki peran yang sangat penting, hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti kegiatan sosialisasi yang dimana BPBD bertugas membentuk sebuah kelompok-kelompok di setiap desa atau kelurahan untuk melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.

Selain itu BPBD juga melakukan evakuasi maupun dalam pembagian bantuan berupa sembako kepada korban pada setiap Kabupaten yang tersebar di Pulau Lombok. Ada beberapa kendala pada saat menghadapi bencana gempa bumi pada tahun 2018 lalu yaitu; Koordinasi antar lintas sektor yang dimana sudah baik tapi belum optimal, karena koordinasi atau komunikasi ini adalah ujung tombak dalam penanganan bencana. SDM yang juga terbatas, lokasinya sangat luas dan membutuhkan sumberdaya dari luar daerah. Ini disebabkan karena anggota pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi.

2.1.2. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain : Kepala Pelaksana dan kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Staf Dinas Sosial, Lurah Lewaja, dan Masyarakat yang tidak lain korban bencana banjir itu sendiri. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa: Observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan informan- informan serta masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah daerah laksanakan. Seperti:

(1). Penetapan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah

mengeluarkan Perda No 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (2). Pencegahan bencana, langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah penguatan tebing dan pemasangan beronjong (3). Tanggap darurat, pemerintah daerah telah mendirikan posko pengungsian dan dapur umum (4). Rehabilitasi dan Rekontruksi, pemulihan yang berupa perbaikan sarana dan prasarana akan tetapi belum terpenuhi secara keseluruhan berhubung dana yang dimiliki terbatas.

2.1.3. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Medan

Dalam penelitian ini, berbagai masalah yang sering dijumpai organisasi kurang mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kapasitas BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana dengan melihat perlu adanya peningkatan sumber daya, kompetensi, etika dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Untuk mewujudkan kapasitas indikator yang harus dilihat yaitu pengembangan kapasitas. BPBD Kota Medan dalam penanggungan bencana masih terkendala dari kekurangan sarana dan prasarana transportasi yaitu, mobil pengambil korban bencana dan peralatan dalam mendukung pemberian bantuan khusus terhadap penyintas seperti dalam pengarusutamaan gender. Sumber

daya manusia yang dimiliki masih kurang dalam jumlah dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih terbatas hal ini juga perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan BPBD Kota Medan perlu peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui program pengembangan kapasitas dengan menjalin kepada pihak swasta, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dan meningkatkan pengawasan secara langsung.

2.2. Teori yang relevan tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Sosial dengan Bencana

2.2.1. Definisi Bencana Alam

Definisi bencana menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Soehatman, 2011: 10). “Bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana”. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya kehidupan manusia sehingga dapat merugikan baik secara material maupun non material. Adapun definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 : Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian diatas menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu kehidupan baik bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, bencana non alam alam seperti halnya gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan lain-lain.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bencana alam Bencana alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, meteor, pemanasan global, banjir, topan, dan tsunami.

2.2.2. Konsep Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (BNPB : 2012). Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang (Maryani : 2002).

Definisi mitigasi bencana menurut Joko, (2011 : 279). “Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko bencana.

Menurut Coppola (2006) mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya menciptakan *early warning system* atau sistem peringatan dini, hingga pembuatan shelter bencana atau bangunan tahan bencana sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu.

2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana melalui modifikasi kebiasaan manusia atau proses alami tanpa melibatkan

penggunaan keahlian teknik struktur, seperti kebijakan atau regulasi, pemetaan daerah rawan bencana, penyadaran masyarakat dan program pendidikan.

2.2.3. Konsep Peran

Menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen” sebagai berikut :

1. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya,
2. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen,
3. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat,
4. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, dan
5. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

2.2.4. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi beberapa istilah dalam teori peran yaitu :

1. Kedudukan orang- orang dalam perilaku,
2. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
3. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, dan
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

2.2.5. Jenis-Jenis Peran

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2002), adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Merupakan suatu peran yang dikerjakan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan dan hanya dilakukan pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu atau perorangan. maksudnya, peran pasif ini hanya diartikan sebagai symbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.6. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.” BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal,
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana,
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

2.2.7. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau oleh karna ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.

Sedangkan definsi menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1:” Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan tau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Berdasarkan definisi bencana, bahwa dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Ada peristiwa
2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia.
3. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan- lahan/bertahab.
4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian

sosial ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.

5. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI NO. 24/2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi.

Penanggulangan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antara instansi. Karena sebagai suatu sistema kerja sama, disin dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi disuatu daerah.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana, antara lain :

1. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau

mengurangi ancaman bencana.

2. Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
5. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.
6. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap

rehabilitas ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

7. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Dari beberapa upaya diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.2.8. Relevansi Penelitian dengan Pekerjaan Sosial dengan Bencana

2.2.8.1. Pengertian Pekerja Sosial

Max Siporin dalam Heru Sukoco (2011 : 3) menyatakan bahwa "Pekerjaan sosial merupakan suatu metoda institusi untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka. " Lebih jauh dia mengatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu institusi sosial, merupakan suatu profesi pelayanan kemanusiaan dan merupakan suatu praktek yang ilmiah dan teknis.

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Heru Sukoco (2011 : 4) bahwa Pekerjaan Sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan,

mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka." Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam Heru Sukoco (2011 : 5) mengemukakan bahwa "Pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok, masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Charles Zastrow dalam Heru Sukoco (2011 : 7) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai "Suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi mereka mencapai tujuan."

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan sosial yang bersifat profesional yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka mampu memperbaiki serta meningkatkan keberfungsian sosialnya.

2.2.8.2. Prinsip Pekerjaan Sosial

Menurut Maas (1997) dalam Adi (2005 : 78) prinsip-prinsip pekerjaan sosial adalah :

1. Penerimaan bahwa pekerja sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut.

2. Komunikasi, bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
3. Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi klien.
6. Kesadaran diri, pekerja sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien.

2.2.8.3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Heru Sukoco (2011 : 19) menyatakan bahwa pekerjaan Sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas. " Pekerjaan sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial.

Dean H. Hepworth dan Jo Ann Larsen dalam Heru Sukoco (2011 : 19) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial adalah :

- 1) Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi serta memecahkan masalahnya.

- 2) Membantu orang memperoleh sumber-sumber.
- 3) Membuat organisasi organisasi yang responsive dalam memberikan pelayanan kepada orang.
- 4) Memberikan fasilitas antara individu dengan individu lain di dalam lingkungan mereka.
- 5) Mempengaruhi interaksi antra organisasi-organisasi dengan institusi-institusi.
- 6) Mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan.

2.2.8.4. Konsep Tahapan dan Proses Pertolongan Pekerjaan Sosial

Max Siporin dalam Iskandar (2013 : 65) membagi proses pertolongan pekerjaan sosial kedalam lima tahap :

1) Engagement, Intake and Contract

Tahap ini merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu dan memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien didalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya

2) *Assesment*

Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah dan kebutuhan klien. Dalam rangka asesmen ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3) Rencana Intervensi

Merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien.

Beberapa metode yang digunakan dalam perencanaan intervensi adalah wawancara, diskusi, pembahasan kasus.

4) Intervensi

Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Pelaksanaan intervensi dilaksanakan sesuai rencana yang sebelumnya dibahas.

5) Evaluasi

Merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam *planning* serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan tujuan. Evaluasi terdiri dari dua yaitu evaluasi proses, berkenaan dengan berlangsungnya kegiatan dan evaluasi hasil, berkenaan dengan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan.

2.2.8.5. Metode Pekerjaan Sosial *Group Work*

The National of Social Work mengemukakan pengertian *Social*

Group Work adalah Suatu pelayanan kepada kelompok, yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (*social adjustment*), dan tujuan keduanya untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat.

Selain itu, Trecker dalam Sundayani (2015) menyatakan bahwa *social groupwork* adalah "Metode dimana pekerja sosial membimbing interaksi individu dalam kelompok pada suatu program kegiatan sehingga mereka mampu berhubungan antara satu dengan yang lainnya."

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *social groupwork* itu adalah metode untuk menghadapi masalah individu-individu dalam suatu kelompok sehubungan dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosial.

2.2.8.6. Peran Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Adapun peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat (*community development*) menurut Spergel dan Zastrow dalam Adi (2014 : 31) adalah :

- 1) Peran Fasilitator, yakni membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada.
- 2) Perantara (*Broker*), yakni menghubungkan individu atau masyarakat yang membutuhkan layanan masyarakat.

- 3) Pendidik (*Education*), Menyampaikan informasi dengan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh sasaran perubahan.
- 4) Tenaga Ahli (*Expert*), memberikan masukan dan dukungan informasi dalam berbagai area sebagai bahan pertimbangan masyarakat/organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Perencanaan sosial (*Social Planner*), yakni mengumpulkan data tentang masalah sosial, menganalisis data sampai dengan tersusunnya perencanaan program sebagai solusi atas masalah yang dihadapi klien.
- 6) Advokat (*Advocate*), melakukan pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun layanan.
- 7) Aktivis (*Activist*), yakni melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dengan tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung,

2.2.8.7. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Klasifikasi sistem sumber menurut Allen Pincus dan Minahan dalam Anwar Sitepu yaitu :

1. Sistem sumber alamiah atau informil; meliputi keluarga dan kerabat.
Bantuan yang diperoleh orang dari sistem sumber ini dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, serta pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih nyata dari keluarga, kerabat, rekan atau lingkungan tetangga. Sistem sumber ini juga

dapat digunakan untuk merintis jalan bagi penggunaan kedua sistem sumber lainnya.

2. Sistem sumber formil; yaitu keanggotaan dalam organisasi tertentu yang sifatnya formil atau bertujuan untuk meningkatkan minat-minat anggotanya. Sistem ini dapat menyediakan sumber-sumber bagi anggotanya untuk menggunakan sistem

sumber yang lain. Contohnya serikat buruh, perkumpulan orangtua murid, dan lain sebagainya.

3. Sistem sumber kemasyarakatan, yaitu lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau swasta yang memberikan pelayanan kepada semua orang. Contohnya sekolah, rumah sakit, LBH, dan badan-badan sosial lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini banyak menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan bersifat deskriptif seperti proses kerja, pengertian konsep, model fisik dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015 : 9) tentang metode penelitian deskriptif.

Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilihat dari segi program dan dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif juga digunakan untuk lebih memahami setiap fenomena yang masih belum banyak diketahui orang.

Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015 : 10)

Sesuai dengan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai Mitigasi Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Penjelasan Istilah

Peneliti membuat penjelasan istilah untuk memperjelas dan mempermudah mengenai konsep, pengertian serta menghindari penafsiran dalam penelitian ini. Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mitigasi

Mitigasi (penjinakan) upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi bangsa atau masyarakat (Carter, 1992).

Upaya mitigasi di Kota Painan bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya mitigasi di kota Painan:

1. Identifikasi Risiko Bencana: BPBD melakukan analisis

menyeluruh untuk mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang paling berpotensi terjadi di kota Painan, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau tanah longsor. Identifikasi daerah-daerah yang rawan terhadap bencana-bencana ini.

2. Pemetaan Daerah Rawan: BPBD membuat peta daerah rawan bencana yang mencakup titik-titik risiko tinggi, termasuk pemukiman penduduk, infrastruktur kritis, dan lingkungan alam di Kota Painan
3. Perencanaan Darurat: Pihak BPBD mengembangkan rencana darurat yang melibatkan koordinasi antara pihak berwenang setempat, petugas pemadam kebakaran, tim medis, dan lembaga-lembaga penyelamatan. Pastikan rencana ini mencakup evakuasi, penanganan korban, dan distribusi bantuan darurat jika terjadi bencana.
4. Konstruksi Tahan Gempa dan Tsunami: Dalam pembangunan infrastruktur baru, BPBD Menerapkan standar konstruksi tahan gempa dan tsunami. Perkuat bangunan-bangunan yang ada untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan tanah dan gelombang tsunami. Pihak BPBD di Kota Painan Membangun shelter yang digunakan sebagai tempat evakuasi jika terjadi bencana.
5. Sistem Peringatan Dini: BPBD memasang sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan kepada

masyarakat saat bencana mendekat. Peringatan dini yang dilakukan BPBD berupa sistem peringatan tsunami atau alarm gempa.

6. Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat: BPBD melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan cara menghadapinya.
7. Penyediaan Sarana Evakuasi: Identifikasi dan persiapkan lokasi evakuasi yang aman dan nyaman bagi penduduk saat bencana terjadi. Lokasi evakuasi atau shelter yang dibangun di Kota Painan terletak di bukit Makam Pahlawan.
8. Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Pihak BPBD menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya.

Upaya mitigasi seperti ini akan membantu meningkatkan ketahanan kota Painan terhadap bencana dan melindungi nyawa serta harta benda penduduk. Perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam hal mitigasi bencana sangat penting untuk menghadapi potensi ancaman bencana.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya mitigasi berupa pembangunan tempat

evakuasi (*shelter*) dan jalur evakuasi secara bertahap, namun jumlahnya masih belum memadai dan perlu penambahan, beberapa ruas jalan kabupaten yang dapat difungsikan sebagai jalur evakuasi masih berada dalam kondisi rusak dan butuh peningkatan serta pemeliharaan, karena keberadaan jalur evakuasi sangat penting guna memperlancar upaya penyelamatan warga jika terjadi bencana.

2. Bencana Alam

Menurut UU No, 24 Tahun 2007, bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat, bisa disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak pada psikologis korbannya.

Bencana alam menjadi peristiwa yang sering terjadi di Kota Painan, bencana yang tercatat berupa banjir, longsor, dan gempa. Kota Painan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan termasuk ke dalam zona merah bencana. Secara umum wilayah kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia.

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kota Painan adalah potensi banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, wilayah kota Painan dialiri oleh sungai besar Timbulun. Secara historis tipikal daerah dataran rendah kota Painan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya

merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

Potensi bencana yang sering terjadi dikota painan selanjutnya yaitu longsor. Kota painan juga sangat berpotensi longsor dikarenakan dengan wilayah Kota Painan memiliki kemiringan tanah yang tinggi dan lereng curam cenderung memiliki risiko longsor yang tinggi, curah hujan yang tinggi di Kota Painan mengakibatkan tanah menjadi jenuh air sehingga meningkatkan risiko longsor terutama di lereng yang tidak stabil.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana

(Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

3.3. Penjelasan Latar Penelitian

Latar penelitian ini menggunakan latar terbuka dan latar tertutup. Latar terbuka menurut Lofland dalam Moleong (2011 : 137) yaitu : "Hubungan peneliti dengan subjek kurang akrab, peneliti hanya mengandalkan pengamatan dan kurang sekali mengadakan wawancara". Sedangkan latar tertutup menurut Lofland dalam Moleong (2011 : 137) yaitu : "Hubungan peneliti perlu akrab karena latar demikian bercirikan orang-orang sebagai subjek yang perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam. Dengan sendirinya strategi berperan sertanya peneliti dalam latar tertutup demikian sangat diperlukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan latar tertutup dengan cara mengamati dan melakukan wawancara mendalam dengan anggota BPBD Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4. Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang dijadikan informan adalah beberapa orang yang berhubungan tulisan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Jabatan	Kode Informan	Jumlah
1	Kepala BPBD	Informan 1	1
2	Masyarakat lokal	Informan 2	1
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Informan 3	1
4	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Informan 4	1

Sumber : Olahan Peneliti (2022)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program Mitigasi Bencana BPBD Kota Painan seperti foto- foto kegiatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan menyesuaikan kondisi lapangan pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Observasi (*Observation*)

Observasi yang dimaksudkan yaitu peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan program Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, serta dokumentasi kegiatan observasi yang ditampilkan dalam skripsi ini berupa foto yang telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari informan. Observasi akan dilakukan secara terbatas dikarenakan masih dalam masa pandemi *Covid-19*.

Data dan informasi yang berhasil peneliti kumpulkan menyangkut 3 (tiga) komponen yaitu :

- 1) Tempat (*place*); tempat yang diobservasi yaitu Kantor BPBD Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, daerah rawan bencana, bangunan evakuasi bencana.
- 2) Pelaku (*actor*); pelaku yang diobservasi yaitu Analis Mitigasi Bencana BPBD dan masyarakat umum.
- 3) Aktivitas (*activity*), aktivitas ini berkaitan dengan program Mitigasi Bencana yang telah dilakukan maupun masih dalam perencanaan oleh BPBD

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkaya informasi dan menunjang hasil dari penelitian. Peneliti dapat melihat dokumen dan arsip-arsip yang dimiliki BPBD berupa, file dan foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut dengan persetujuan pengurus.

Peneliti mengoptimalkan koordinasi dengan pengurus via telepon dan meminta kerjasama melalui *WhatsApp* (WA). Hal ini dilakukan peneliti untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

3.6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada kriteria tertentu. Moleong (2011 : 324) berpendapat ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Empat kriteria tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*credibility*)

Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri atau pencarian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang absah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat penguji, diantaranya sebagai berikut :

1) Meningkatkan ketekunan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan

secara lebih cermat dan berkesimbangan. Peneliti melakukannya dengan membaca referensi buku maupun hasil penelitian. Peneliti mengecek kembali hasil data dan informasi yang telah diperoleh. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti juga melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak berkaitan dengan program Mitigasi Bencana.

2) Triangulasi

Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu, dijabarkan sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek informasi yang telah diperoleh dari informan.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek kembali informasi yang diperoleh dari informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Informasi dari para informan yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dihidupkan kembali dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi yang ada.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan informasi dan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam situasi waktu yang berbeda.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan merupakan validitas eksternal pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Keteralihan ini dapat terpenuhi

dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan juga bergantung pada kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima hasil penelitian. Tujuannya adalah agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya (Sugiono, 2009 : 276). Dalam penelitian ini, maka membuat laporan hasil penelitian dengan memberikan uraian rinci, sistematis dan dapat dipercaya, terkait program Mitigasi Bencana BPBD Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Bilamana pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian ini, maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Suatu penelitian dapat dikatakan *dependability* apabila orang lain mampu mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan proses audit keseluruhan proses penelitian. (Sugiyono, 2015.277) Dalam hal ini, peneliti melakukan proses audit atau pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, kriteria *confirmability* disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati banyak orang. Uji kepastian mirip

dengan pengujian *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal ya berhubungan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2015 : 277)

3.7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep Miles & Huberman dalam Sugiyono (2015 : 246) yang interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh." Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan konsep tersebut (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2015 : 247-252) yaitu dengan cara :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, yaitu memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, Pelaksanaan reduksi data dalam penelitian awal tahun 2022 dengan merangkum semua hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit, dan belum bermakna mengenai program Mitigasi Bencana BPBD Kota Painan. Data yang telah direduksi tersebut akan

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan lagi.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah melalui tahapan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data yang berupa kategori-kategori, yaitu tentang program Mitigasi Bencana Alam.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap data-data yang telah dipadukan melalui berbagai macam teknik dan dari berbagai sumber yang dicatat dalam catatan lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3.8. Jadwal dan Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun jadwal dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Tahap Awal

- 1) Studi literatur dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2022
- 2) Pengajuan judul dilaksanakan pada bulan Januari 2022
- 3) Bimbingan proposal dilaksanakan pada bulan Februari 2022
- 4) Penyusunan proposal dilaksanakan pada bulan Februari 2022

- 5) Seminar proposal dilaksanakan pada 2-4 Februari 2022
 - 6) Bimbingan dan Penyusunan instrumen penelitian pada bulan Februari-Maret 2022
 - 7) Penjajakan lokasi penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2022
 - 8) Mengurus surat izin penelitian pada bulan Februari-Maret 2022
2. Tahap Pelaksanaan
- 1) Pemahaman lokasi pada bulan Februari 2022
 - 2) Pengumpulan data pada bulan Januari sampai bulan Maret-Mei 2022
3. Tahap Akhir
- 1) Analisis data dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2022.
 - 2) Bimbingan Penulisan skripsi dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2022.
 - 3) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2022.
 - 4) Sidang skripsi dilaksanakan pada bulan Juli 2022.

Tabel 3.2. Jadwal dan Langkah-Langkah Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Studi Literatur							
2	Pengajuan Judul							
3	Bimbingan dan Penyusunan Proposal							
4	Seminar Proposal							

5	Penjajakan Lokasi Penelitian							
6	Bimbingan dan Penyusunan instrumen penelitian							
7	Pengumpulan Data							
8	Pengolahan dan Analisis Data							
9	Bimbingan dan Penulisan Skripsi							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Painan merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis Kota Painan terletak pada posisi $100^{\circ} 32' - 100^{\circ} 47'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 09,70' - 1^{\circ} 22,70'$ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Painan adalah 8,49 km². Kota Painan memiliki ketinggian 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.

Secara Umum Nagari Painan beriklim Tropis, dengan temperatur 21 - 31°C, curah hujan di Kenagarian Painan 2.000 - 3.000 Mm/tahun. Kondisi topografi Kota Painan cukup bervariasi yaitu datar, dan perbukitan yaitu bukit langkisau yang sebagai penunjang objek pariwisata di Kota Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.

Jumlah penduduk Kota Painan menurut dalam angka tahun 2022 ialah sebanyak 7.016 jiwa, yang terdiri dari 3.461 laki-laki dan 3.555 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.844 KK.

Kota Painan memiliki wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut :

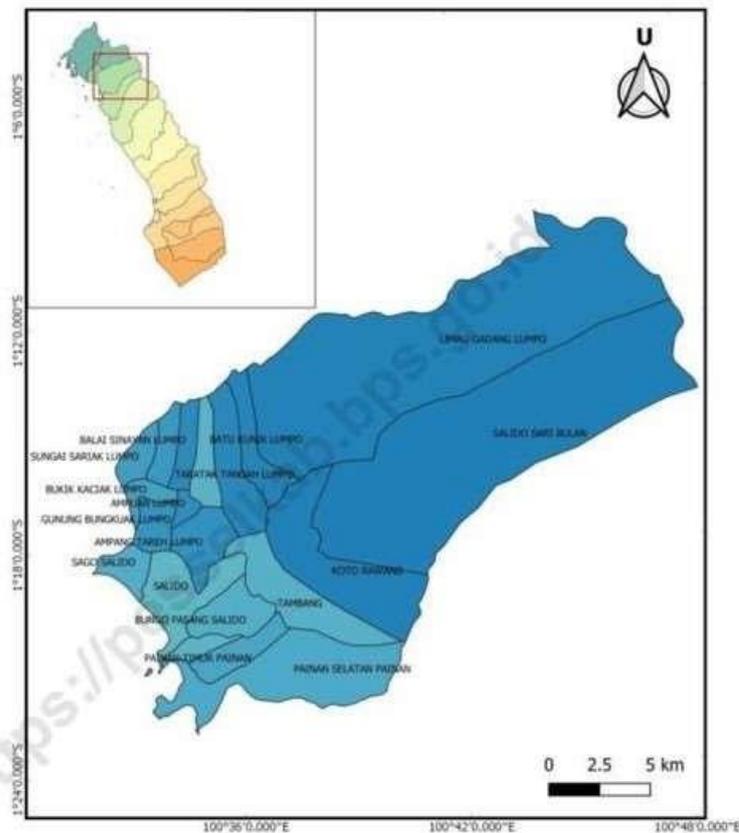
Utara : Kenagarian Salido

Timur : Kenagarian Lumpo

Selatan : Kenagarian Batang Kapas

Barat : Samudera Hindia

Peta administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



4.1. Gambar Peta Kabupaten Pesisir Selatan

4.1.1. Struktur Organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pesisir Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang Penanggulangan Bencana dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan

(Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017. Dan berdasarkan Perubahan tersebut maka Sesuai Regulasi kembali pada Perda Nomor 14 Tahun 2010.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

4.1.2. Fungsi Pokok BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pesisir Selatan

Fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

4.1.3. Tugas Pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Pelaksana Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :

- 1) Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- 4) Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 5) Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 6) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala BPBD, Kepala Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dan Analisis Kebencanaan Ahli Muda. Keempat informan ini dipilih karena dinilai mampu dalam memberikan informasi terkait dengan bagaimana peran BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam di kota Painan. Karakteristik Informan lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

1. Informan DG

Informan DG adalah Kepala BPBD. Informan DG berusia 59 tahun beragama islam dengan latar pendidikan terakhir S2 Manajemen.

2. Informan IM

Informan IM adalah masyarakat lokal kota Painan. Informan IM berusia 47 tahun beragama islam dengan latar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.

3. Informan DB

Informan DB adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Informan DB berusia 48 tahun bergama islam dengan Pendidikan terakhir S2 Manajemen.

4. Informan WR

Informan WR berusia 39 tahun beragama islam yang merupakan Analis Kebencanaan Ahli Muda dengan Pendidikan terakhir Sarjana Teknik.

Adapun karakteristik dari masing masing informan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Karakteristik Informan

No	Nama (Inisial)	L/P	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	GD	L	59	S2	Kepala BPBD
2	IM	P	47	SMA	Pedagang
3	DB	L	48	S2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	WR	L	39	S1	Analis Kebencanaan Ahli Muda

4.2.2. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau

dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku sebagai leading sector dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18. Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Adapun kabupaten/kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka

penanganan penanggulangan bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, BPBD menyanggah tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahan serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan serta sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat dan tepat, efektif dan efisien.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Seperti teori yang telah dijelaskan oleh Coppola, (2006) Mitigasi bencana dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya menciptakan early warning system atau sistem peringatan dini, hingga pembuatan shelter bencana atau bangunan tahan bencana sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu.

2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana melalui modifikasi kebiasaan manusia atau proses alami tanpa melibatkan penggunaan keahlian teknik struktur, seperti kebijakan atau regulasi, pemetaan daerah rawan bencana, penyadaran masyarakat dan program pendidikan.

Untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Mitigasi di Kota Painan, peneliti menggunakan indikator-indikator meliputi Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural :

4.2.2.1. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Mitigasi Struktural

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam upaya mitigasi struktural di Kota Painan. BPBD bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana secara fisik seperti merancang dan membangun infrastruktur atau bangunan tahan bencana, membuat peta rawan bencana, serta mengawasi pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan.

Kemudian peran BPBD dalam mitigasi struktural yang dijelaskan dalam sesi wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (DB) sebagai berikut :

“Bentuk mitigasi struktural yang kami lakukan seperti memantau jalannya program dan kegiatan di bidang mitigasi, menyediakan sarana dan prasarana, operasional dan perawatan PUSDATIN, membuat peta rawan bencana dan di agendakan pembuatan jalur evakuasi di daerah Pincuran Boga”.

Berdasarkan pernyataan Informan DB, Mitigasi Struktural yang dilakukan berupa :

1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis dalam bidang mitigasi bencana alam adalah langkah penting untuk

memastikan eektivitas upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pemantauan yang efektif akan membantu memastikan bahwa program mitigasi bencana berjalan sesuai rencana, dana digunakan dengan efisien, dan risiko bencana dapat berkurang sesuai yang diharapkan. Ini juga membantu dalam pembelajaran berkelanjutan untuk perbaikan program di masa depan.

Berdasarkan laporan kinerja BPBD tahun 2020, pemantauan dan kegiatan teknis yang telah dilakukan berupa menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja, merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang mitigasi, dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi.

2. Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan data laporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mengalami peningkatan sarana dan prasarana dari tahun 2017 hingga 2020. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan BPBD masih membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti mobil ambulance, tangki air, *MCK Mobile*, Buldozer dan alat berat lainnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2020 penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA TANGGAP BENCANA

NO	KONDISI	SATUAN	TAHUN				KET
			2017	2018	2019	2020	
1	Transportasi						
	1. Jenis Angkutan Darat						
	1. Kendaraan Roda 2	Unit	9	9	9	9	
	2. Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	5	

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Tahun 2020

11

	3. Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	
2	Jenis Angkutan Laut						
	1. Kapal Penyelamat	Unit			0	1	
	2. Speedboat	Unit		1	1	1	
	3. Perahu Karet	Unit		3	3	5	
	4. Jetsky	Unit			0	0	
	3. Jenis Angkutan Udara/Helikopter	Unit			0		
2	Jumlah peralatan Komunikasi						
	1. Handy Talky	Unit	6	16	16	16	
	2. Telepon Satelit	Unit	1	1	1	1	
	3. Radio Pemancar	Unit	1	1	1	1	
	4. Peralatan Komunikasi lainnya	Unit	3	3	3	3	
3	Peralatan Kesehatan						
	1. Mobil Ambulance	Unit	2	2	2	1	
	2. Tandu	Unit	1	1	1	1	
	3. Tabung Oksigen	Unit	2	2	2	2	
	4. Peralatan Kesehatan lainnya	Unit			0	0	
4	Peralatan Air Bersih						
	1. Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	
	2. Tangki Air	Unit	0	0	0	0	
	3. Water treatment	Unit	1	1	1	1	
	4. Peralatan Air Bersih Lainnya	Unit			0		
5	MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit			0		
6	Alat Berat						
	1. Kobelco	Unit	1	1	1	1	
	2. Buldozer	Unit			0	0	
	3. Peralatan Alat Berat lainnya	Unit			0	0	
7	Peralatan Hunian Sementara						
	1. Tenda	Unit	11	11	11	11	
	2. Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	
	3. Generator	Unit	2	2	2	2	
	4. Peralatan Hunian Sementara Lainnya	Unit			0	0	
	5. Shinso	Unit			4	5	Rusak

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Tahun 2020

1.7.

12

**1.5. Tabel Laporan Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2020**

Berdasarkan data tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai bentuk menjalankan peran mitigasi struktural, data tersebut menunjukkan sangat kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan

bencana yang memadai untuk pelaksanaan peran BPBD.

3. Operasional dan Perawatan PUSDATIN

Operasional dan perawatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) di kota Painan adalah langkah penting dalam menjaga kelancaran sistem informasi dan komunikasi pemerintah setempat. Melakukan operasional dan perawatan Pusdatin dengan baik akan membantu pemerintah Kota Painan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada warganya dan menjaga kelancaran informasi tingkat lokal

Bertugas mengelola data kebencanaan yang bersifat statis (tidak berubah) yang meliputi data kejadian bencana, korban, kerusakan dan taksiran kerugian. Penyajian informasi yang dikelola BPBD disajikan melalui website BPBD Kab.Pesisir Selatan pada periode yang ditentukan.

BPBD Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan perawatan Pusdatin secara berkala dan baik, namun operasional yang dilakukan masih belum optimal yang menyebabkan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai edukasi mitigasi bencana alam.

4. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Pemetaan daerah rawan bencana adalah proses identifikasi dan pemahaman wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk

mengalami bencana alam. Pemetaan ini merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi bencana karena membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko bencana potensial di Kota Painan.

Pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan BPBD di kota Painan berupa pemetaan daerah rawan banjir, daerah rawan tanah longsor dan daerah rawan gempa bumi. Dalam pelaksanaannya peta daerah rawan bencana sudah dilakukan pembuatan namun belum optimal di sosialisasikan kepada masyarakat Kota Painan. Sehingga peta daerah rawan bencana hanya tersedia di kantor BPBD dan masyarakat sulit menemukan peta daerah rawan bencana

5. Pembuatan jalur evakuasi

Jalur evakuasi adalah rute yang direncanakan untuk digunakan saat terjadi situasi darurat atau evakuasi. Rute ini biasanya ditandai dengan jelas dan digunakan untuk mengarahkan orang-orang keluar dari bangunan atau daerah yang berpotensi berbahaya.

Pembuatan jalur evakuasi di Kota Painan merupakan langkah penting untuk meningkatkan persiapan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau kebakaran. Pembuatan jalur evakuasi merupakan komponen kunci dalam mitigasi bencana dan keselamatan warga kota Painan.

BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi disetiap kecamatan.

Diantara kecamatan tersebut, paling banyak adalah di Kota Painan. Sebab Painan merupakan ibu kota kabupaten Pesisir Selatan, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Beberapa jalur yang sudah dibangun diantaranya, Puncak Langkisau, Bukit Sei Nipah, dan bukit Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya jalur evakuasi yang diagendakan yaitu jalur evakuasi Pincuran Boga.

Informan DB menjelaskan bahwa peran BPBD dalam mitigasi struktural membantu dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana, berikut penjelasannya :

“Upaya struktural yang kami lakukan dalam mitigasi bencana di Kota Painan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Painan. Dengan adanya pemahaman yang baik dan analisis yang akurat kami dapat mengidentifikasi daerah rawan bencana, menentukan faktor penyebab, dan merencanakan Langkah mitigasi yang spesifik dan tepat sasaran.”

Dari penuturan Informan DB, mitigasi struktural yang dilakukan BPBD berperan penting dalam mengurangi kerentanan infrastruktur dan bangunan di Kota Painan terhadap dampak bencana dapat membangun ketahanan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan menggunakan data dan analisis yang akurat pula memungkinkan pihak BPBD untuk merancang infrastruktur yang tahan bencana, mengatur tata ruang yang

aman, dan menyusun rencana tanggap darurat yang efektif.

Dalam sesi wawancara beberapa manfaat dalam mitigasi struktural disampaikan oleh informan WR, berikut penuturan informan WR :

“Manfaatnya sangat signifikan, infrastruktur yang tahan bencana mengurangi risiko kerusakan fisik saat terjadi bencana. Selain itu, juga shelter yang dibangun untuk evakuasi jika terjadi bencana tahan bencana. Kemudian dengan adanya peta daerah rawan bencana memberikan informasi penting untuk masyarakat.”

Dari penuturan informan WR, manfaat yang diperoleh dari penerapan mitigasi struktural dalam mitigasi bencana antara lain peningkatan pemahaman tentang risiko bencana, pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terinformasi, pengurangan kerentanan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Jadi mitigasi struktural membantu pihak BPBD mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko bencana.

Dalam penerapan mitigasi struktural, pihak BPBD menghadapi tantangan, berdasarkan penuturan dari informan WR sebagai berikut :

“Kami telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana secara menyeluruh dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, namun dalam proses sosialisasi kepada masyarakat di Kota Painan masih belum optimal kami lakukan.”

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi

penelitian, sangat sulit menemukan peta daerah rawan bencana, baik peta secara fisik di sekitar kota Painan maupun di media online.

4.2.2.2. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Mitigasi Non-Struktural

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Painan memiliki peran penting dalam melaksanakan mitigasi non-struktural di kota Painan. Peran ini melibatkan berbagai langkah untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi non- struktural ini mengakui bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang berharga dalam menghadapi bencana. Sebagaimana disampaikan oleh informan DG sebagai kepala BPBD Pesisir Selatan dalam sesi wawancara sebagai berikut :

“Peran mitigasi non-struktural sangat penting dalam mitigasi bencana alam. Kami bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana, memberikan pelatihan dan edukasi mitigasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kami juga berupaya mengembangkan kapasitas individu dan komunitas untuk merespon bencana dengan baik, hal ini menjadikan peran kami menjadi sangat penting karena kami melibatkan masyarakat secara penuh.”

Menurut informasi dari informan DG, BPBD memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana,

masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat Kota Painan dalam menghadapi masyarakat.

Informasi yang diperoleh informan DG terdapat hambatan yang dihadapi BPBD di Kota Painan sebagai berikut :

“Masyarakat kita ini masih perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya. Masih adanya masyarakat yang responsif dan tidak memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana.”

Berdasarkan penuturan DG, pihak BPBD berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman tentang mitigasi bencana. Sesuai dengan informasi yang diberikan informan IM selaku masyarakat lokal sebagai berikut :

“Istilah mitigasi terasa asing bagi saya, namun berdasarkan informasi yang adik berikan tadi tentunya saya mengerti kalau artinya pencegahan terhadap bencana alam”.

Dari penuturan informan IM menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang bahkan tidak tahu apa itu mitigasi, hal ini menjadi tugas penting bagi BPBD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lokal.

Informasi dari informan DG diperkuat dengan data dari laporan kinerja BPBD mengenai identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana hal ini dikarenakan belum

terjalinnnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan masyarakat dalam mitigasi bencana.

Jadi, melalui mitigasi non-struktural ini peran yang dilakukan BPBD menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Masyarakat menjadi pihak yang aktif dalam mengurangi risiko bencana, dan kebijakan serta program mitigasi lebih memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.

4.3. Pembahasan

Damon P. Coppola dalam *Introduction to International Disaster Management* (2015:3) mengutarakan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi berusaha membuat bahaya bencana lebih kecil kemungkinannya terjadi atau mengurangi efek negatifnya. Berbagai potensi bencana alam dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk kehilangan harta benda dan korban jiwa. Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat dikurangi melalui mitigasi. Indikator yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi yaitu Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam di Kota Painan, menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan telah berperan dengan baik dalam Upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan. Ini terlihat dari peran mitigasi

yang dilakukan antara lain :

1. Peran Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural dalam konteks mitigasi bencana alam adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan metodologi ilmiah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko bencana.

Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi struktural yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Painan meliputi :

- 1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis dalam bidang mitigasi bencana alam adalah langkah penting untuk memastikan eektivitas upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pemantauan yang efektif akan membantu memastikan bahwa program mitigasi bencana berjalan sesuai rencana, dana digunakan dengan efisien, dan risiko bencana dapat berkurang sesuai yang diharapkan. Ini juga membantu dalam pembelajaran berkelanjutan untuk perbaikan program di masa depan.

Berdasarkan laporan kinerja BPBD tahun 2020, pemantauan dan kegiatan teknis yang telah dilakukan berupa menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja, merumuskan

kebijakan teknis kegiatan bidang mitigasi, dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi.

2) Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan data laporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mengalami peningkatan sarana dan prasarana dari tahun 2017 hingga 2020. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan BPBD masih membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti mobil ambulance, tangki air, *MCK Mobile*, Buldozer dan alat berat lainnya.

3) Operasional dan Perawatan PUSDATIN

Bertugas mengelola data kebencanaan yang bersifat statis (tidak berubah) yang meliputi data kejadian bencana, korban bencana, kerusakan dan taksiran kerugian. Penyajian informasi yang dikelola BPBD Kab. Pesisir Selatan pada periode yang ditentukan.

4) Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Pemetaan daerah rawan bencana adalah proses identifikasi dan pemahaman wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana alam. Pemetaan ini merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi bencana karena membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko bencana potensial di Kota Painan.

Pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Kota Painan berupa pemetaan daerah rawan banjir, daerah rawan tanah longsor dan daerah rawan gempa bumi. Dalam pelaksanaannya peta daerah rawan bencana belum optimal disosialisasikan kepada masyarakat, dikarenakan belum optimal program sosialisasi yang dilakukan BPBD.

5) Pembuatan jalur evakuasi

Jalur evakuasi adalah rute yang direncanakan untuk digunakan saat terjadi situasi darurat atau evakuasi. Rute ini biasanya ditandai dengan jelas dan digunakan untuk mengarahkan orang-orang keluar dari bangunan atau daerah yang berpotensi berbahaya.

Pembuatan jalur evakuasi di Kota Painan merupakan langkah penting untuk meningkatkan persiapan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau kebakaran. Pembuatan jalur evakuasi merupakan komponen kunci dalam mitigasi bencana dan keselamatan warga kota Painan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi disetiap kecamatan. Diantara kecamatan tersebut, paling banyak adalah di Kota Painan. Sebab Painan merupakan ibu kota kabupaten Pesisir Selatan, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Beberapa jalur yang sudah dibangun diantaranya , Puncak Langkisau, Bukit Sei Nipah, dan bukit Taman Makam Pahlawan.

Selanjutnya jalur evakuasi yang diagendakan yaitu jalur evakuasi Pincuran Boga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terungkap bahwa peran BPBD dalam penerapan mitigasi struktural terdapat keterbatasan data dan informasi yang akurat, terutama di daerah yang sulit terjangkau atau terdampak infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, harus adanya pemahaman dan penguasaan teknologi yang diperlukan untuk analisis dan pemodelan risiko. Pemenuhan kebutuhan finansial dan sumber daya yang berkualitas juga merupakan tantangan dalam mengimplementasikan mitigasi struktural secara efektif.

2. Mitigasi Non-struktural

Mitigasi Non-struktural dalam konteks mitigasi bencana alam mengacu pada pada pengakuan dan penghargaan terhadap peran serta partisipasi masyarakat dalam usaha untuk mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan komunitas. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang berharga dalam menghadapi bencana.

Deskripsi hasil penelitian menunjukan bahwa Mitigasi Non-struktural yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Painan meliputi :

1) Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Sebagai bentuk menjalankan perannya dalam upaya mitigasi

Non struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir selatan melakukan kegiatan berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesadaran tentang risiko bencana, pemahaman tentang Tindakan pencegahan, dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan program edukasi, masyarakat diberikan informasi yang akurat dan relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bencana alam dan Tindakan yang dapat diambil.

2) Partisipasi Masyarakat

Dalam perannya sebagai mitigasi non struktural BPBD mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program mitigasi. Masyarakat dianggap sebagai mitra penting dalam proses pengambilan keputusan, dan pendapat mereka didengar dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan Tindakan mitigasi. Partisipasi ini mencakup pengorganisasian komite- komite bencana di tingkat masyarakat, pelibatan kelompok-kelompok masyarakat, dan kolaborasi dengan organisasi lokal.

3) Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kegiatan yang mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam merespon bencana. Masyarakat diberikan pelatihan keterampilan seperti pertolongan pertama, penggunaan peralatan darurat, evakuasi, dan pemulihan pasca

bencana. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, masyarakat dapat lebih siap dan dapat mengurangi risiko bencana.

4) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pendekatan ini mengedepankan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas adat. Melalui kerja sama yang erat, berbagai pihak bekerja bersama untuk mengidentifikasi risiko bencana, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi, dan membangun kapasitas bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terungkap bahwa kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa masyarakat masih kurang memahami pentingnya mitigasi bencana dan belum menganggapnya sebagai prioritas. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antara BPBD dan masyarakat masih belum optimal.

Pembahasan hasil penelitian akan membahas keseluruhan hasil penelitian dengan cara mengaitkan hasil penelitian dengan kajian teori / konsep yang relevan. Pembahasan hasil penelitian meliputi analisis penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis sumber. Berikut merupakan pembahasan hasil penelitian:

4.3.1. Analisis Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti melakukan analisis hasil penelitian terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya

mitigasi bencana alam di kota Painan. Peran BPBD yang diteliti dan di analisis yaitu bagaimana peran mitigasi struktural yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya mitigasi bencana alam, bagaimana peran mitigasi non-struktural yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya mitigasi bencana alam, dan apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi BPBD dalam upaya mitigasi di kota Painan.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan terdapat dua aspek yakni Mitigasi struktural dan Mitigasi non-struktural, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan sudah cukup baik dalam upaya pelaksanaan Mitigasi bencana di kota Painan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penelitian mendalam terkait dua aspek yakni Mitigasi Struktural, Mitigasi Non-struktural.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi struktural

Melalui aspek peran mitigasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan perannya secara holistik dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan.

4.3.2. Analisis Masalah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Mitgasi Bencana Alam

di Kota Painan dapat dikatakan sudah cukup baik dalam upaya pelaksanaan Mitigasi bencana di kota Painan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penelitian mendalam terkait aspek Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-struktural. Namun pada saat dilakukan wawancara mendalam, peneliti menemukan beberapa masalah atau hambatan yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait aspek tersebut.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Painan dalam mitigasi struktural meliputi analisis risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, pengembangan sistem pemantauan, dan penerapan tindakan mitigasi teknis. BPBD bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis data bencana, melakukan pemetaan wilayah rawan, serta mengembangkan sistem peringatan dini. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara mendalam, peneliti menemukan tantangan yang di hadapi oleh BPBD yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan BPBD dalam melaksanakan peran secara optimal.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Painan dalam mitigasi non-struktural meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana. Implementasi yang

dilakukan BPBD dengan melakukan kampanye penyuluhan, pelatihan, dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Painan adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, serta kendala dalam komunikasi efektif dengan masyarakat.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa masalah prioritas yang diidentifikasi :

1. Keterbatasan sumber daya : salah satu masalah yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mempengaruhi kemampuan BPBD dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, menyebarkan informasi kepada masyarakat, dan mengelola data bencana dengan efektif.
2. Belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan Mitigasi Bencana : masalah yang sering dihadapi dan menjadi masalah yang menjadi prioritas BPBD adalah BPBD belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan program-program sehingga kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan pentingnya upaya mitigasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi juga menjadi kendala. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi yang memadai, upaya mitigasi bencana menjadi kurang efektif. Hal ini tentunya menjadi prioritas utama BPBD sebagai bentuk perannya

dalam penanggulangan bencana.

3. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaan daerah rawan bencana.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan dalam upaya mitigasi saling berkorelasi antara hambatan yang satu dengan yang lainnya. Dengan optimalnya satgas BPBD dengan melakukan berbagai program mengenai sosialisasi mitigasi bencana akan memberikan edukasi kepada masyarakat kota Painan mengenai dampak dan resiko bencana, sehingga akan timbul kepedulian masyarakat akan pencegahan atau mitigasi bencana alam.

4.3.3. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis permasalahan hasil penelitian mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti melihat bahwa terdapat kebutuhan yang di perlukan dalam rangka mengoptimalkan peran BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam, kebutuhan itu antara lain :

1. Melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana alam.
2. Melakukan penyuluhan Peta Daerah Rawan bencana alam kepada masyarakat Kota Painan.

Berdasarkan analisis masalah yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum optimal dalam melakukan sosialisasi

dan penyuluhan sehingga masyarakat di Kota Painan belum seluruhnya mengerti akan pentingnya mitigasi bencana alam oleh karena itu harus dibuatkan suatu program berbentuk penyuluhan yang sasarannya adalah masyarakat Kota Painan yang belum mengerti akan pentingnya mitigasi bencana alam sekaligus menyebarkan program-program mitigasi bencana alam serta mensosialisasikan mengenai pemetaan daerah rawan bencana yang sudah dilakukan di beberapa wilayah agar dapat diberlakukan juga di wilayah yang masih belum melakukan program tersebut, tujuannya agar optimalnya mitigasi bencana alam di kota painan serta terjalinnya koordinasi yang baik antara BPBD dengan masyarakat Kota Painan dalam upaya mitigasi bencana alam.

4.3.4. Analisis Sistem Sumber

Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai peran BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diidentifikasi beberapa sistem sumber yang dapat membantu. Sistem sumber tersebut dapat mendukung untuk mengoptimalkan peran BPBD Pesisir Selatan dalam upaya mitigasi.

Berikut sistem sumber yang peneliti identifikasi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan, sebagai Lembaga pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
2. Tokoh Masyarakat, sebagai perseorangan yang memiliki pengaruh dalam masyarakat di Kota Painan.

BAB V USULAN PROGRAM

5.1. Dasar Pemikiran

Mitigasi bencana alam merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang, di Kota Pai-nan mitigasi bencana alam ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, na-mun fakta di lapangan mengatakan bahwa masih banyak aspek yang masih perlu di evaluasi dan ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada hambatan bagi BPBD untuk mengoptimalkan upaya mitigasi bencana alam yaitu masih banyak masyarakat yang berada di daerah rawan bencana belum mengerti tentang penting nya mitigasi bencana sehingga tingkat kepeduliannya masih tergo- long rendah, oleh karena itu sudah menjadi tugas dari BPBD Pesisir Selatan un-tuk membuat masyarakat nya mengerti akan pemahaman tentang mitigasi bencana, baik masyarakat yang wilayahnya rawan bencana maupun tidak, karena pemahaman ini akan berguna untuk kedepannya.

5.2. Nama Program

Berdasarkan pada dasar pemikiran yang telah di paparkan serta mempertimbangkan hasil analisis masalah, kebutuhan dan sistem sumber maka peneliti mengusulkan program **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana.**

5.3. Tujuan Program

Adapun Tujuan dari program penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana yaitu sebagai berikut :

5.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari program ini yaitu untuk membuat penyebaran dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di Kota Painan tentang mitigasi bencana alam agar timbulnya kepedulian masyarakat serta memberikan informasi tentang pemetaan daerah rawan bencana alam.

5.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari program ini antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana alam.
2. Mengedukasi Masyarakat tentang Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak bencana alam.
3. Memperkenalkan peta daerah rawan bencana kepada masyarakat dan mengajarkan cara menggunakannya.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana alam

5.4. Sasaran Program

Sasaran dari program ini adalah masyarakat Kota Painan secara umum.

5.5. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan dalam program dibagi beberapa unsur penting yaitu sistem partisipan serta pengorganisasian program. Berkaitan dengan usulan program yang telah di sebutkan, pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

5.5.1. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan suatu kesatuan yang terlibat dalam pelaksanaan pro-gram atau kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi sistem klien, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran dan sistem kegiatan. Berikut merupakan sistem partisipan dari adanya program **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana** antara lain :

1. Sistem Klien

Sistem klien merupakan sejumlah orang yang membutuhkan pertolongan dan memperoleh keuntungan dari adanya program. Klien dari kegiatan ini yaitu masyarakat Kota Painan yang mengikuti kegiatan tersebut.

2. Sistem Pelaksana Perubahan

Sistem pelaksana perubahan merupakan sekumpulan orang yang akan mem- bawa perubahan dan dapat membantu berjalannya program. Pelaksana perubahan dalam program ini yaitu Satuan Tugas Mitigasi

Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan.

3. Sistem Sasaran

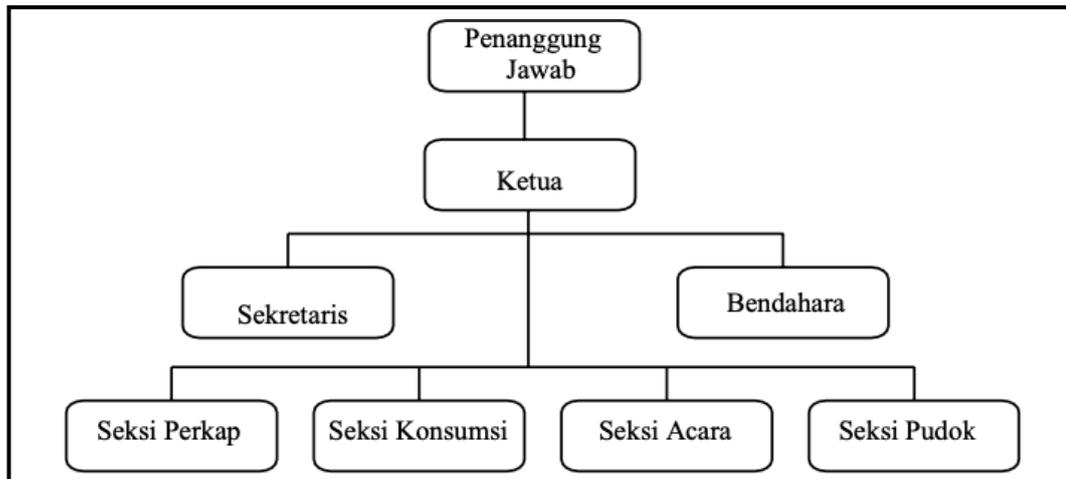
Sistem sasaran merupakan orang-orang, badan-badan atau organisasi yang di- jadikan target sasaran dalam melakukan perubahan. Sasaran dari program ini yaitu seluruh masyarakat Kota Painan.

4. Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bekerjasama dengan sistem pelaksana perubahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem kegiatan da- lam kegiatan ini yaitu Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan.

5.5.2. Pengorganisasian Program

Sistem pengorganisasian dalam program ini yaitu adanya kepanitiaan atau pengurus untuk menjalankan program. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dari program **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana** dapat tercapai. Berikut merupakan struktur kepengurusan yang program tersebut :



Gambar 5.1. Sistem Pengorganisasian

Tugas pokok dan fungsi dari sistem pengorganisasian program tersebut meliputi :

1. Penanggung jawab, bertugas untuk memutuskan dan menetapkan ke-bijakan yang diperlukan untuk melaksanakan program. Selain itu, pe-nanggung jawab juga dapat memberikan arahan, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksana program. Penanggung jawab dalam program ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan.
2. Ketua pelaksana, bertugas untuk mengkoordinir semua anggota agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ketua dari pro-gram ini yaitu Ketua SATGAS Mitigasi Bencana BPBD.
3. Sekretaris, bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat admin-istratif seperti surat-menyurat, notulensi kegiatan baik proses maupun hasilnya.
4. Bendahara, bertugas mengelola keuangan seperti pemasukan dan penge-luaran anggaran selama program berjalan.

5. Seksi acara, mempunyai tugas untuk mengatur sistematika pelaksanaan kegiatan seperti konsep, waktu, pemateri dan jadwal kegiatan.
6. Seksi pubdok, bertugas untuk menjadi narahubung dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan serta sebagai pihak yang mengabadikan setiap momen dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Seksi konsumsi, mempunyai tugas untuk menyiapkan konsumsi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam acara tersebut seperti pemateri, panitia, dan peserta program.
8. Seksi perkap, bertugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

5.6. Metode dan Teknik

Metode pekerjaan sosial yang digunakan dalam **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana** yaitu pekerja sosial dengan masyarakat atau *Community Work* atau sering dikenal dengan *Community Organization/Community Development (COCD)* dengan menggunakan pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan pemahamannya terkait pencegahan atau mitigasi bencana alam.

5.6.1. Metode Pekerjaan Sosial Makro

Metode pekerjaan sosial yang dilakukan dalam program ini adalah metode *community work* atau pekerja sosial dengan masyarakat

yang sering dikenal dengan *Community Organization/ Community Development (COCD)*. Metode *community work* dipilih sebagai upaya perubahan berencana yang memandang bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses penanganan secara masyarakat. Metode *community work* ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang memiliki permasalahan kurangnya edukasi mengenai mitigasi bencana.

5.6.2. Teknik

Praktik pekerjaan sosial dengan masyarakat secara *community work* merupakan suatu bentuk penanganan yang dilakukan kepada masyarakat, dengan tujuan mampu memberikan pengembangan dan kemajuan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses belajar mengajar atau penanaman nilai, ke- biasaan dan aturan. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya upaya mitigasi atau pencegahan bencana alam dan penyuluhan mengenai peta rawan bencana di Kota Painan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan teknik diskusi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah kelompok dan membahas satu topik secara spesifik. Dari sekelompok orang yang

terkumpulkan, peneliti biasanya akan mengambil kesimpulan dari pendapat seputar topik yang dibahas. Diskusi ini akan dipimpin oleh satu orang dan biasanya dijalankan secara informal. Hal ini dilakukan agar peserta tidak merasa tertekan untuk menyampaikan pendapat mereka.

5.7. Kegiatan Program

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan program **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana** terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

1. Penjabaran mengenai pengetahuan tentang mitigasi bencana dan motivasi untuk menimbulkan kepedulian pencegahan/mitigasi bencana alam.
2. Penjabaran mengenai Peta Daerah Rawan Bencana.

5.8. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam pelaksanaan **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana**, yaitu :

5.8.1. Tahap Persiapan

Tahap awal pelaksanaan adalah persiapan yang mencakup hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung berjalannya program.

Kegiatan pada tahap ini yaitu

:

1. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan

Pelaksana panitia kegiatan tersebut terdiri penanggung jawab,

ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi pubdok, seksi konsumsi, dan seksi perkap. Panitia pelaksana melibatkan SATGAS Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan.

2. Mengadakan Rapat Pelaksanaan Program

Rapat dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rapat juga dilakukan untuk menganalisis masalah dan kebutuhan dari program serta melakukan koordinasi dengan seluruh panitia pelaksana.

3. Penentuan Waktu dan Tempat Pelaksana Program

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program mempertimbangkan kondisi sasaran dan pelaksana program. Dalam hal ini, program dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center. Kegiatan program ini akan dilaksanakan dalam satu hari di hari minggu.

4. Kontak Pendahuluan

Kontak pendahuluan dilakukan untuk menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pihak yang terkait diantaranya Pemerintah Daerah Kota Painan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

5. Koordinasi Kepada Pihak Terkait

Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait Pemerintah Daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sehingga

tujuan dari program dapat tercapai. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan komunikasi antara pihak satu dengan yang lainnya.

6. Sosialisasi Program

Melakukan sosialisasi program yang telah disusun kepada sasaran dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang program yang akan dilaksanakan.

5.8.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program **Penyuluhan Mitigasi Bencana Alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana** dilakukan dalam dua kegiatan yaitu :

1. **Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana.** Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengundang para masyarakat Kota Painan, untuk menghadiri Penyuluhan Mitigasi Bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana.
- 2) Melakukan pembukaan acara oleh pembawa acara dan sambutan dari ketua pelaksana.

- 3) Memberikan materi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mengenai pentingnya mitigasi bencana alam.
- 4) Memberikan materi Peta Daerah Rawan Bencana kepada peserta kegiatan.
- 5) Melakukan diskusi dan Tanya jawab dengan para peserta.
- 6) Penutupan oleh ketua pelaksana.

Rangkaian Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan

No	Hari Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Minggu	08.30- 09.00	Pendaftaran peserta	Seksi Acara
		09.00- 09.05	Pembukaan	Pembawa Acara
		09.05- 09.10	Sambutan	Ketua Pelaksana
		09.10- 09.40	Pemberian materi mengenai pentingnya mitigasi bencana	SATGAS
		09.40- 09.55	<i>Break</i>	Seksi konsumsi

		09.55-10.25	Pemberian materi mengenai Peta Daerah Rawan Bencana	SATGAS
		10.25-11.00	Diskusi	Pekerja Sosial dan Narasumber
		11.00-11.05	Penutupan	Pembawa Acara

5.8.3. Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan. Tahap evaluasi dilakukan setelah semua kegiatan pelaksanaan program selsesai. Berikut adalah evaluasi yang dilakukan :

1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses digunakan untuk mengetahui keberlangsungan kegiatan yang telah dirancang. Evaluasi ini berkaitan dengan partisipasi peserta dalam kegiatan tersebut, peran aktif peserta dan penerima manfaat dalam berdiskusi dan tanya jawab serta antusiasme penerima manfaat akan adanya program tersebut.

2. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil digunakan untuk memberikan penilaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut akan menarik kesimpulan tentang kegiatan yang dilaksanakan apakah berjalan dengan baik ataupun terkendala.

5.8.4. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan proses penutupan atau pengakhiran kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan. Pada tahap ini dapat dilihat seberapa jauh hasil dari adanya kegiatan tersebut yang dilakukan bersama dengan peserta kegiatan. Cara yang digunakan adalah mengidentifikasi hambatan serta kekurangan dari pelaksanaan program sehingga hasil tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan dan perbaikan program.

5.9. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program ataupun kegiatan. Kegiatan program Penyuluhan Mitigasi Bencana diperlukan biaya sebagai berikut :

Tabel 5.2. Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Mitigasi Bencana dan Peta Rawan Bencana

No	Jenis Belanja	Volume	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi				
1	Snack peserta	50 box	10.000	500.000

2	Snack pemateri	2 box	25.000	50.000
Honorium				
1	Pemateri	2 orang	250.000	500.000
2	Transport dan akomodasi pemateri	2 orang	50.000	100.000
Jumlah				1.150.000

Sumber dana pada program ini dapat di peroleh dari pemerintah Kota Painan dan juga bisa mencari donatur-donatur untuk ikut menyumbangkan dana segar, rencana anggaran diatas hanya sebagai tolak ukur untuk membuat program tersebut kemungkinan jumlahnya bisa berubah sesuai kebutuhan dilapangan.

5.10. Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan program digunakan untuk menemukan gambaran suatu pro-gram untuk mengetahui kekuatan, kelemahan serta faktor-faktor lain yang dapat mendukung program. Analisis yang digunakan untuk menguji kelayakan program adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Adapun ana-kisin SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh program ini antara lain :

- a. Adanya potensi dan sumber dari BPBD dalam pelaksanaan program ini.
- b. Pemerintah Daerah yang selalu mendukung dalam mengurangi permasalahan bencana di Kota Painan.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Kesibukan peserta yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan.
 - b. Masyarakat yang belum tentu mau untuk dapat berpartisipasi dan memahami mitigasi bencana banjir.
3. *Opportunities* (Peluang)
- a. Adanya narasumber yang berkompeten dalam bidangnya yang dapat diakses yaitu SATGAS Mitigasi Bencana.
 - b. Masyarakat Kota Painan yang antusias akan program yang diberikan
4. *Threats* (Ancaman)
- a. Program yang di tawarkan tidak mendapat respon positif dari masyarakat.
 - b. Pengetahuan yang telah diberikan kepada para peserta tidak diaplikasikan, sehingga tidak berdampak apapun.

Berdasarkan analisis kelayakan program Penyuluhan mitigasi bencana alam dan peta daerah rawan bencana masih terdapat kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat jalannya program. Namun, hal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai jalan keluar. Kelemahan tersebut dapat diselesaikan melalui pemilihan hari yang tepat seperti hari Minggu karena sebagian besar masyarakat tidak bekerja dan tidak ada kegiatan.

5.11. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program bertujuan untuk mengetahui

pencapaian keberhasilan program yang telah dilakukan. Adapun indikator keberhasilannya adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat kan pentingnya mitigasi bencana alam.
2. Masyarakat jadi mengetahui daerah rawan bencana melalui Peta Daerah Rawan Bencana.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang pencegahan bencana alam.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Mitigasi bencana merupakan sebuah usaha dalam mengurangi resiko-resiko yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam itu sendiri. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non- struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Usulan program yang digunakan adalah Penyuluhan mitigasi bencana alam dan Sosialisasi Peta Daerah Rawan Bencana. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat penyebaran dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di Kota Painan tentang mitigasi bencana alam agar timbulnya kepedulian masyarakat serta

memberikan informasi tentang pemetaan daerah rawan bencana alam.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan meliputi pengadaan sosialisasi dan kajian-kajian serta mensosialisasikan peta rawan bencana kepada masyarakat dengan tujuan edukasi juga meminimalisir korban jiwa maupun kerugian harta benda.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Upaya Mitigasi Bencana di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan berikut adalah saran yang dapat saya berikan :

6.2.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Saran yang di berikan peneliti kepada pihak BPBD yaitu :

1. BPBD Pesisir Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja terutama di bagian mitigasi bencana karena merupakan tahapan penanggulangan bencana yang prioritas guna menekan resiko bencana alam.
2. Memperkaya program-program terutama yang berkoordinasi dengan masyarakat agar terjalannya kontribusi yang baik antara BPBD dengan masyarakat.

6.2.2. Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dalam Upaya Mitigasi Bencana di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai peran BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No.24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*.
- Sukoco, D. H. (2011). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: STKS Press.
- Arikunto, S.(2005). *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S.(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BAKORNAS PBP. (2007). *Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Sugiyono. (2004). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Kabupaten Pesisir Selatan 2021*; Painan.
- Nursyabani, Roni E.P., dan Kusdarini. (2020). Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 8(2): 81-90.
- Subardjo, Petrus, Gersanandi, Agus Anugroho. (2013). Analisa Spasial Kerentanan Bencana Tsunami Di Kabupaten Dan Kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat. *Oceanografi*. 2(3): 232-237.
- Kartasapoetra, A. G .(1987). *Penyuluhan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujiono, P. (2004). Kerangka l Koordinasi dan Mekanisme untuk Penanggulangan Bencana di Daerah.

Bungin, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

Subardjo, Petrus, Gersanandi, Agus Anugroho. 2013. *Analisa Spasial Kerentanan Bencana Tsunami Di Kabupaten Dan Kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat*. Oseanografi, 2(3), 232-237.

Kartasapoetra. A G (1987:7). *Penyuluhan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pujiono, DR. Puji,(2004) *Kerangka Kelembagaan,Koordinasi dan Mekanisme untuk Penanggulangan Bencana di Daerah*.

Bungin, Burhan, (2001) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal Pedoman Umum Mitigasi Bencana

Subardjo, Petrus, Gersanandi, Agus Anugroho. 2013. *Analisa Spasial Kerentanan Bencana Tsunami Di Kabupaten Dan Kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat*. Oseanografi, 2(3), 232-237.

Kartasapoetra. A G (1987:7). *Penyuluhan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pujiono, DR. Puji,(2004) *Kerangka Kelembagaan,Koordinasi dan Mekanisme untuk Penanggulangan Bencana di Daerah*.

Bungin, Burhan, (2001) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal Pedoman Umum Mitigasi Bencana

Laporan Kinerja BPBD Pesisir Selatan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 1511/6.1.8/DL.02.02/05/2022 30 Mei 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik (KESBANGPOL)
 Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, maka mahasiswa :

Nama : BHAKTI PERSADA
NRP : 18.04.295
Tempat/Lokasi Penelitian : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Akan menyusun skripsi tentang :

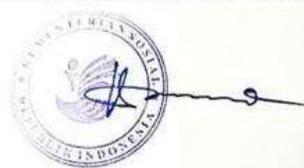
" Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin bagi mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan pengumpulan data sekunder secara *online* (jarak jauh) di wilayah/instansi yang Bapak/Ibu pimpin mulai dari tanggal **30 Mei 2022** s.d **30 Juni 2022** dengan judul penelitian tersebut di atas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Bagian

Administrasi Akademik dan Perencanaan



Hasanudin Emka

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Poltekesos Bandung (sebagai laporan)
2. Peringgal

Lampiran 2 Surat Kesbangpol



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Rohana Kudus Painan - Email: Kesbangpolkab. Pessel@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor 070/151/BKPol-PS/Rek/IV/2022

- Membingkai**
1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian
 2. Bahwa sesuai konsideran angka 1 serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat
- Mengingat**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan**
- Surat Kepala Bagian Administrasi dan Perencanaan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Nomor 1372/6.1.B/DL.02.02/05/2022, tanggal 13 Mei 2022, tentang Permohonan Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada:
- Nama : BHAKTI PERSADA
 Tempat/Tgl Lahir : Painan, 10 Februari 2000
 Alamat : Jl. Sultan Syahrir, No.01 Painan Selatan
- Pekerjaan : Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 NRP : 18.04.295
 Judul Penelitian : "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan"
 Lokasi Penelitian : BPBD Pesisir Selatan
 Waktu Penelitian : 18 Mei s/d 30 Juni 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Memberitahukan kedatangan peneliti kepada Instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan dan Adat Budaya serta kearifan lokal.
4. Memberitahukan kepada Instansi lokasi penelitian bahwa Penelitian telah selesai, dibuktikan Surat Keterangan selesai Penelitian dari Instansi terkait.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan
6. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Penelitian yang dilakukan lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka Peneliti wajib melakukan Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian.
7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Painan, 18 Mei 2022
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

HARDI DARMA PUTRA, SH., M.Si

Pembina (IV/a)
 NIP. 196709011986021001

Terdapat Kesalahan Yth.

1. Dapat Diapata/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan ; sebagai laporan ;
2. Nk. Cansel IV Juru Kab. Pesisir di Sagar
3. Sek. Wab. Negeri Pesisir Selatan Ek. IV Juru Kab. Pesisir di tempur
4. Arsip

Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 1 Skenario Pedoman Wawancara

SKENARIO WAWANCARA
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1	Tujuan	<p>Memperoleh informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik informan 2. Mengetahui bagaimana peran BPBD dalam upaya mitigasi struktural di kota Painan 3. Mengetahui bagaimana peran BPBD dalam upaya mitigasi non-struktural di kota Painan 4. Mengetahui hambatan yang dihadapi BPBD dalam upaya mitigasi benana di kota Painan
2	Teknik	Wawancara mendalam
3	Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPBD Kab.. Pessel 2. Masyarakat Lokal 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Analis Kebencanaan Ahli Muda

4	Lokasi	Kantor BPBD Kab. Pessel
5	Durasi	Maksimal dua jam satu sesi wawancara
6	Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan mengadakan penelitian 2. Menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai, difoto, serta direkam untuk kemudian dijadikan dokumen dalam penelitian 3. Melakukan tanya jawab sesuai dengan pedoman wawancara 4. Menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan informan memberikan informasi 5. Meminta izin dan kesediaan informan untuk menerima peneliti kembali apabila ada yang perlu dilengkapi dalam penelitian
7	Perlengkapan	<p>Perlengkapan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan 2. Alat tulis 3. <i>Smartphone</i>

PEDOMAN OBSERVASI
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1	Tujuan	Mengetahui secara langsung bagaimana Peran BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam di Kota Painan
2	Aspek yang diamati	Struktural dan Non-Struktural
3	Waktu	Menyesuaikan Kondisi di Lapangan
4	Tempat	Lokasi Penelitian (Kota Painan)
5	Alat yang digunakan	Buku, alat tulis, dan <i>smartphone</i>

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

I. Karakteristik Informan

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Keterangan :

II. Pertanyaan Untuk Informan

a. DG (Kepala BPBD Kab. Pessel)

1. Bagaimana peran BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana tingkat daerah dalam menanggulangi bencana terkhususnya peran mitigasi non-struktural ?

2. Bagaimana contoh konkret tentang penerapan mitigasi non-struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan ?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh BPBD dalam penerapan mitigasi non-struktural di Kota Painan
4. Bagaimana harapan atau pesan bapak kepada masyarakat terkait mitigasi non-struktural dalam mitigasi bencana ?

b. IM (Masyarakat Lokal)

1. Apakah ibu mengetahui tentang mitigasi bencana ?
2. Apakah ibu mengetahui atau merasakan program yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi bencana alam ?
3. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mitigasi bencana alam yang dilakukan BPBD ?

c. DB (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)

1. Bagaimana Mitigasi Struktural yang dilakukan oleh BPBD Kota Painan dalam upaya mitigasi bencana ?
2. Bagaimana BPBD melaksanakan peran Mitigasi Struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan
3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh BPBD dalam melaksanakan peran tersebut ?
4. Bagaimana BPBD mengatasi tantangan tersebut ?

d. WR (Analisis Kebencanaan Ahli Muda)

1. Bagaimana pelaksanaan Mitigasi Struktural yang dilakukan oleh BPBD Kota Painan dalam upaya mitigasi bencana ?
2. Bagaimana manfaat Mitigasi Struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan ?
3. Bagaimana BPBD memastikan bahwa infrastruktur sesuai dengan standar tahan bencana ?
4. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mitigasi struktural ?

TRANSKRIP WAWANCARA

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Karakteristik Informan

- 1) Nama (Inisial) : DG
- 2) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3) Usia : 59
- 4) Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen
- 5) Pekerjaan : Kepala BPBD Kab. Pessel

2. Hasil Wawancara

3. No	Fokus Masalah	Jawaban Informan	Analisis
1	Bagaimana peran BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana tingkat daerah dalam menanggulangi bencana	Peran mitigasi non-struktural sangat penting dalam mitigasi bencana alam. Kami bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang	BPBD memegang peran penting dalam penanggulangan bencana terutama mitigasi atau pencegahan bencana

	terkhususnya dalam upaya mitigasi ?	<p>bencana, memberikan pelatihan dan edukasi mitigasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kami juga berupaya mengembangkan kapasitas individu dan komunitas untuk merespon bencana dengan baik, hal ini menjadikan peran kami menjadi sangat penting karena kami melibatkan masyarakat secara penuh</p>	
2	Bagaimana contoh konkret tentang penerapan mitigasi	BPBD bidang mitigasi ko diak contohnya	Program mitigasi bencana berupa Peningkatan

	non-struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan ?	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku dalam pengurangan resiko bencana, tu ado Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.	Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku dalam pengurangan resiko bencana, Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.
3	Apa tantangan utama yang dihadapi oleh BPBD dalam penerapan mitigasi non-struktural di Kota Painan	masyarakat kita ini masih perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya. Masih adanya masyarakat yang responsif dan tidak memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana	Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi
4	Bagaimana harapan atau pesan bapak kepada masyarakat	Saya ingin mengajak semua warga untuk mengambil bagian	BPBD mengajak masyarakat untuk berpartisipasi

	terkait mitigasi non-struktural dalam mitigasi bencana ?	bersama kami BPBD. Kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah investasi bagi kita semua masyarakat kota Painan	aktif dalam upaya mitigasi
--	--	---	----------------------------

TRANSKRIP WAWANCARA
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Karakteristik Informan

- 6) Nama (Inisial) : IM
 7) Jenis Kelamin : Perempuan
 8) Usia : 47
 9) Pendidikan Terakhir : SMA
 10) Pekerjaan : Pedagang

2. Hasil Wawancara

No	Fokus Masalah	Jawaban Informan	Analisis
1	Apakah ibu mengetahui tentang mitigasi bencana ?	Istilah mitigasi terasa asing bagi saya, namun berdasarkan informasi yang adik berikan tadi tentunya saya mengerti kalau artinya pencegahan terhadap bencana alam.	Informan IM asing dengan istilah mitigasi bencana, tetapi paham dengan pencegahan bencana.

2	Apakah ibu mengetahui atau merasakan program mitigasi bencana yang dilakukan BPBD ?	Yang saya tahu program yang sampai ke masyarakat sekitar bisa dibilang jarang ya. Saya belum pernah mengikuti kegiatan dari BPBD karena mungkin informasinya tidak sampai. Yang saya tahu dibelakang rumah saya dekat bukit ada tempat evakuasi jika ada bencana datang.	.informan IM tidak pernah mengikuti program dari BPBD dikarenakan informasi tidak merata ke masyarakat. Informan IM hanya mengetahui tindakan mitigasi berupa tempat evakuasi bencana yang ada didekat rumahnya.
---	---	--	--

3	Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan BPBD terkait mitigasi bencana ?	Saya belum pernah mengikuti sosialisasi Atau menerima informasi, mungkin kegiatan tersebut ada namun pemberitahuannya tidak sampai ke saya	Informan IM belum pernah mengikuti sosialisasi dari BPBD dan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai penyuluhan atau sosialisasi.
---	--	--	---

TRANSKRIP WAWANCARA
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Karakteristik Informan

- 11) Nama (Inisial) : DB
- 12) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 13) Usia : 53
- 14) Pendidikan Terakhir : S2
- 15) Pekerjaan : Kepala Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Hasil Wawancara

No	Fokus Masalah	Jawaban Informan	Analisis
1	Bagaimana Mitigasi Struktural yang dilakukan oleh BPBD Kota Painan dalam upaya mitigasi bencana ?	Bentuk mitigasi struktural yang kami lakukan seperti memantau jalannya program dan kegiatan di bidang mitigasi,	Bentuk mitigasi struktural yang dilakukan berupa observasi, sarana dan prasarana, perawatan PUSDATIN,

		<p>menyediakan sarana dan prasarana, operasional dan perawatan PUSDATIN, membuat peta rawan bencana dan di agendakan pembuatan jalur evakuasi di daerah Pincuran Boga</p>	<p>Peta daerah rawan bencana dan diagendakan pembuatan jalur evakuasi.</p>
2	<p>Bagaimana BPBD melaksanakan peran Mitigasi Struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan</p>	<p>Upaya struktural yang kami lakukan dalam mitigasi bencana di Kota Painan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Painan. Dengan</p>	<p>Upaya struktural diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar siap menghadapi bencana.</p>

		<p>adanya pemahaman yang baik dan analisis yang akurat kami dapat mengidentifikasi daerah rawan bencana, menentukan faktor penyebab, dan merencanakan Langkah mitigasi yang spesifik dan tepat sasaran</p>	
3	<p>Apa tantangan utama yang dihadapi oleh BPBD dalam melaksanakan peran tersebut ?</p>	<p>Kami telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana secara menyeluruh dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, namun dalam proses sosialisasi kepada masyarakat</p>	<p>Tantangan yang dihadapi berupa proses sosialisasi kepada masyarakat belum optimal.</p>

		di Kota Painan masih belum optimal kami lakukan	
4	Bagaimana BPBD mengatasi tantangan tersebut ?		

TRANSKRIP WAWANCARA
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KOTA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Karakteristik Informan

- 1) Nama (Inisial) : WR
- 2) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 3) Usia : 37
- 4) Pendidikan Terakhir : S1
- 5) Pekerjaan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

2. Hasil Wawancara

No	Fokus Masalah	Jawaban Informan	Analisis
A	Peran Mitigasi Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		
1	Bagaimana pelaksanaan Mitigasi Struktural yang dilakukan oleh BPBD Kota Painan dalam	Bentuk mitigasi struktural yang kami lakukan seperti memantau jalannya program dan kegiatan di bidang mitigasi,	.

	upaya mitigasi bencana ?	menyediakan sarana dan prasarana, operasional dan perawatan PUSDATIN, membuat peta rawan bencana dan di agendakan pembuatan jalur evakuasi di daerah Pincuran Boga	
2	Bagaimana manfaat Mitigasi Struktural dalam upaya mitigasi bencana di Kota Painan ?	Manfaatnya sangat signifikan, infrastruktur yang tahan bencana mengurangi risiko kerusakan fisik saat terjadi bencana. Selain itu, juga shelter yang dibangun untuk evakuasi jika terjadi bencana tahan bencana. Kemudian dengan adanya peta	Mitigasi struktural memastikan infrastruktur tahan bencana, shelter untuk evakuasi atau pengungsian, serta peta daerah rawan bencana.

		daerah rawan bencana memberikan informasi penting untuk masyarakat	
3	Bagaimana BPBD memastikan bahwa infrastruktur sesuai dengan standar tahan bencana ?	Kami memiliki tim inspeksi yang memantau pelaksanaan konstruksi yang sesuai dan aman digunakan	BPBD bidang mitigasi memiliki tim inspeksi untuk memantau pelaksanaan konstruksi
4	Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mitigasi struktural ?	Partisipasi masyarakat sangat penting . masyarakat dapat berperan dalam memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan, serta memastikan bahwa rumah mereka mematuhi standar tahan bencana.	Partisipasi masyarakat berperan dalam perencanaan pembangunan serta memastikan rumah masyarakat telah mematuhi standar tahan bencana.

		Kesadaran dan partisipasi mereka adalah kunci keberhasilan	